

BAB I

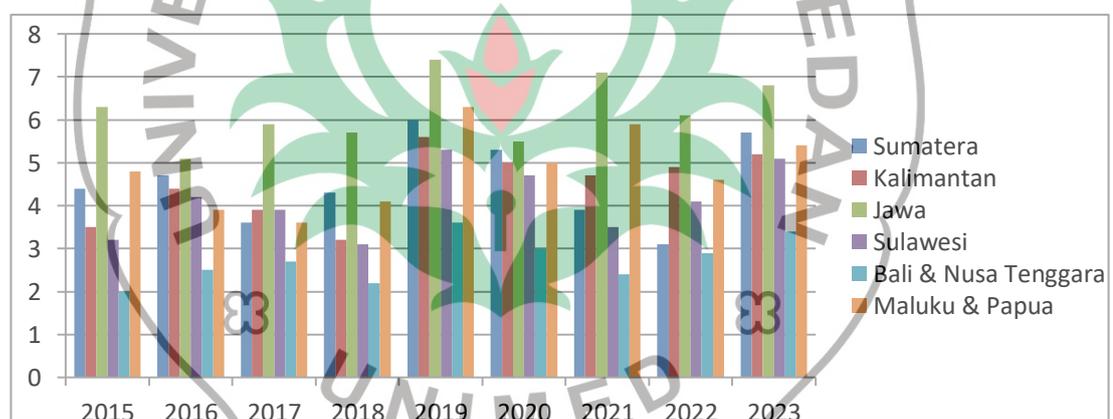
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan standar hidup masyarakatnya dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, membuat SDM berkualitas, dan membuat pengangguran berkurang. Namun dalam membuat kualitas SDM meningkat, masih banyak kendala seperti kesulitan dalam menciptakan peluang kerja yang menjadi tantangan utama. Permasalahan yang muncul adalah ketimpangan permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang membuat para tenaga kerja tak bisa diserap di pasar tenaga kerja. Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat akibat ketidakseimbangan tersebut. Masalah pengangguran telah menjadi hal biasa yang negara berkembang hadapi, Indonesia termasuk diantaranya.

Pengangguran di Indonesia didominasi oleh dua kelompok utama yaitu pengangguran usia muda dan pengangguran terdidik. Kelompok terdidik yang sedang mencari pekerjaan dan tak bekerja yang pendidikan tertingginya SMA, SMK, Diploma dan Sarjana disebut dengan pengangguran terdidik (BPS, 2016). Masalah pengangguran ini hampir dirasakan oleh sebagian wilayah di Indonesia, salah satunya yaitu di Pulau Jawa. Pulau Jawa, ialah wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menempati posisi paling atas dengan jumlah pengangguran terdidik tertinggi. Fenomena pengangguran terdidik ini sering terjadi di kota besar yang penduduknya sangatlah padat.

Menurut Sumarsono (2009), Pengangguran tenaga kerja terdidik mengacu pada angkatan kerja dengan pendidikan menengah dan tinggi (ijazah sekolah menengah atas dan sarjana). Fenomena pengangguran terdidik di kota-kota metropolitan sebagian disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang sesuai. Pengangguran terdidik merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia, karena jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut alasan mengapa memilih pulau jawa ditingkat pengangguran terdidik pada grafik 1.1



Sumber : BPS (data diolah)

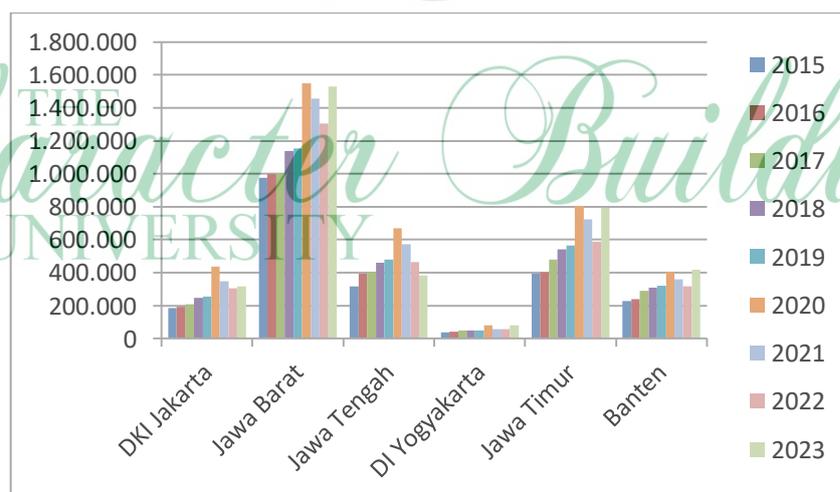
Gambar 1.1

Pengangguran Terdidik di Indonesia Berdasarkan Pulau Tahun 2015-2023

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Pulau Jawa menempati urutan pertama yang mempunyai jumlah pengangguran tertinggi sebesar 7,4% , setelah itu Pulau Maluku & Papua sebesar 6,35%, Pulau Sumatera sebesar 6%, Pulau Kalimantan sebesar 5,6%, Pulau Sulawesi sebesar 5,3%, dan Pulau Bali & Nusa tenggara sebesar 3,6%. Pulau Jawa menjadi yang tertinggi dikarenakan padat penduduk serta pulau ini menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan pusat industri, sehingga terdapat kompetisi dalam pencarian kerja yang sangat ketat. Pulau Jawa

juga mempunyai jumlah tenaga kerja yang besar dengan tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa juga masih kurang dikarenakan jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja tidak seimbang oleh penyerapan tenaga kerja, hal tersebut yang mengakibatkan pengangguran semakin tinggi

Pengangguran terjadi di hampir semua provinsi di Indonesia, termasuk provinsi-provinsi di pulau Jawa. Pengangguran di Pulau Jawa didominasi oleh pekerja dengan pendidikan sekolah menengah (baik umum maupun kejuruan) dan pendidikan tinggi (diploma dan sarjana). Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia, dengan luas 128.297 km² dan dihuni oleh 145.013.573 jiwa (SUPAS). Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, jika lapangan kerja dan sumber daya manusia yang kompeten tidak tumbuh secara bersamaan, maka pengangguran akan meningkat. Berikut adalah jumlah pengangguran terdidik diprovinsi-provinsi Pulau Jawa berdasarkan grafik 1.2



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Grafik 1.2

Jumlah Pengangguran Terdidik Setiap Provinsi di Pulau Jawa (Jiwa)

Dari grafik 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran terdidik di setiap provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi. Pada provinsi DKI Jakarta jumlah pengangguran terdidik pada tahun 2020 lebih tinggi yaitu sebesar 438.287 jiwa disebabkan oleh pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyaknya para pengangguran atau yang sedang mencari pekerjaan yang terhalang akibat adanya permasalahan ini, ditahun 2015 menjadi tahun terendah yaitu 185.962 jiwa dikarenakan pada tahun tersebut dilakukannya penguatan sektor industri dan pelatihan serta peningkatan investasi maka pengangguran ditahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2016 hingga 2023 pengangguran terdidik di DKI Jakarta mengalami kenaikan dikarenakan keterampilan yang dimiliki tidak cocok dengan permintaan pasar serta persaingan yang ketat

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 lebih tinggi yaitu sebesar 1.548.852 jiwa disebabkan oleh kualitas pendidikan dan keterampilan yang dimiliki dan juga ketersediaan lapangan yang terbatas, ditahun 2015 menjadi pengangguran terdidik terendah yaitu 975.874 jiwa disebabkan dengan adanya pelatihan keterampilan dan peningkatan investasi, jika dilihat di tahun 2016-2023 pengangguran terdidik mengalami naik turun yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi seperti kemajuan teknologi.

Pada provinsi Jawa Tengah tahun 2020 paling tinggi yaitu sebesar 669.725 jiwa dikarenakan kurangnya infrastruktur dan pendidikan yang terbatas dan ditahun 2015 terendah yaitu 316.389 jiwa karena berhasil dalam meningkatkan

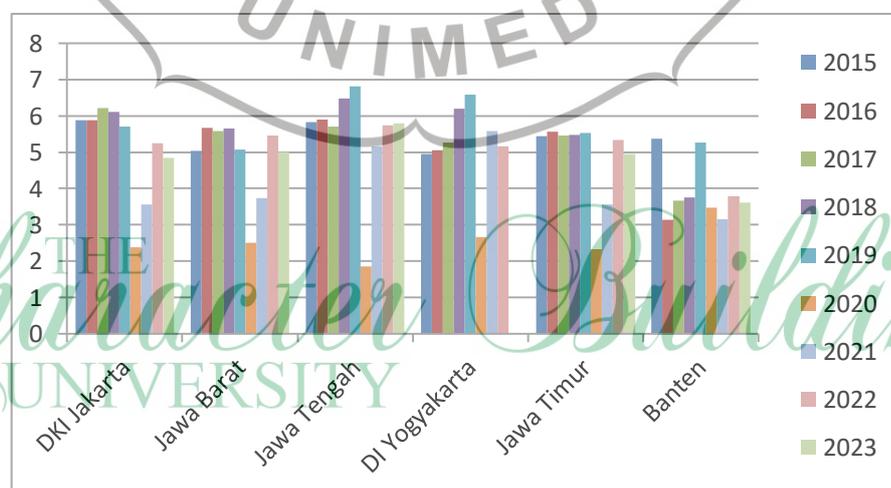
inovasi dan produktivitas dalam sektor ekonomi, sedangkan pada tahun 2016 dan 2023 mengalami fluktuasi diakibatkan oleh ketidakstabilan pada harga komoditas. Di provinsi Yogyakarta pengangguran terdidik paling tinggi tahun 2020 yaitu 79.476 jiwa ini disebabkan oleh efek yang diakibatkan oleh pandemi banyak perusahaan yang terpaksa mengeluarkan karyawan akibat sulitnya finansial, dan terendah ditahun 2015 sebesar 38.258 jiwa disebabkan oleh peningkatan investasi serta ketersediaan lapangan pekerjaan sedangkan ditahun 2016 hingga 2023 terjadi fluktuasi akibat terpengaruh oleh siklus bisnis dimana jika sedang tumbuh maka lapangan kerja lebih banyak sedangkan dimasa resesi maka terpaksa akan mengeluarkan karyawannya.

Pada provinsi Jawa Timur pengangguran terdidik tertinggi pada tahun 2023 sebesar 795.271 jiwa karena banyaknya permintaan tenaga kerja tetapi lapangan kerja yang terbatas dan terendah ditahun 2015 sebesar 394.683 jiwa ini karena upaya yang dilakukan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pelatihan keterampilan untuk mengurangi tingkat pengangguran sangatlah efisien, sedangkan ditahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan karena urangnya infrastruktur dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat menjadi hambatan dalam menciptakan lapangan kerja dan ditahun 2020-2022 mengalami fluktuasi akibat dari permintaan pasar tenaga kerja terhadap permintaan pasar.

Provinsi Banten pengangguran terdidik pada tahun 2023 paling tinggi sebesar 416.892 jiwa karena banyaknya permintaan tenaga kerja tetapi lapangan kerja yang terbatas dan terendah pada tahun 2015 yaitu 228.384 jiwa disebabkan oleh kuatnya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor ekonomi dalam

peningkatan produksi yang tersedia sedangkan ditahun 2016-2023 mengalami penurunan karena ditahun tersebut terjadi kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.

Mankiw (2003) percaya bahwa beberapa faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi kenaikan dan penurunan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada kemampuan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produk dan jasa yang digunakan untuk menilai posisi ekonomi saat ini. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, jumlah pengangguran meningkat; namun, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, begitu pula jumlah produk atau jasa yang dihasilkan. Berikut adalah gambaran laju pertumbuhan ekonomi dalam grafik. 1.3



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Grafik 1.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa (Persen)

Dari grafik 1.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar provinsi yang ada di

Pulau Jawa mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi di provinsi DKI Jakarta tertinggi ditahun 2018 sebesar 6,11% yang disebabkan karena adanya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, di tahun 2020 merupakan yang terendah yaitu 2,39% disebabkan oleh dampak yang terjadi akibat pandemi covid-19 sedangkan ditahun 2017 hingga 2023 mengalami naik turun yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti konsumsi rumah tangga dan peningkatan aktivitas masyarakat.

Pada provinsi Jawa Barat tertinggi ditahun 2016 sebesar 5,67% disebabkan oleh naiknya kinerja industri pengolahan seperti elektronik dan otomotif, ditahun 2020 tahun terendah yaitu 2,5% disebabkan karena melemahnya daya beli kosumsi rumah tangga, jika dilihat ditahun 2017 pertumbuhan ekonominya sekitar 5,58% itu karena lapangan usaha industri pengolahan memberikan andil yang cukup besar dan ditahun 2018 sampai 2023 mengalami naik turun pertahunnya dengan dilakukannya pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi yang tidak stabil.

Provinsi Jawa Tengah laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi pada tahun 2019 sebesar 6,81% karena tingginya lapangan usaha informasi dan komunikasi, terendah ditahun 2020 yaitu 1,85% karena menurunnya investasi dan ditahun 2017 dan tahun selanjutnya mengalami fluktuasi dikarenakan dengan tidak stabilnya ekspor yang terjadi ke jawa tengah membuat pertumbuhan ekonomi ditahun ini meningkat dan juga menurun.

Jika dilihat di DI Yogyakarta pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi ditahun 2019 sebesar 6,59% karena sektor industri pengolahan serta

pengembangan UMKM dan terendah ditahun 2020 sebesar 2,67% karena menurunnya investasi dalam perbaikan ekonomi, dan pada tahun 2017-2018 pertumbuhan ekonominya naik karena semakin tingginya lapangan usaha konstruksi yang diberikan dan ditahun 2021-2023 menurun dikarenakan rendahnya permintaan domestik.

Pada provinsi Jawa Timur laju pertumbuhan ekonomi tertinggi ditahun 2016 sebesar 5,57% karena meningkatnya lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, terendah ditahun 2020 yaitu 1,44% karena menurunnya konsumsi rumah tangga mengakibatkan lemahnya daya beli serta ditahun 2017 sampai 2023 mengalami fluktuasi karena tidak meratanya lapangan usaha dalam memperbaiki perekonomian sehingga mengakibatkan naik turun. Di provinsi Banten ditahun 2015 merupakan yang tertinggi laju pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,37% karena tingginya lapangan konstruksi dan terendah ditahun 2016 yaitu 3,14% diakibatkan oleh melemahnya ekspor yang terjadi serta ditahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan karena meningkatnya permintaan domestik begitu juga meningkatnya lapangan kerja dan ditahun 2021-2022 mengalami kenaikan karena adanya lapangan kerja yang tersedia.

Apabila dilihat dengan jelas laju pertumbuhan ekonomi dipulau jawa antar provinsi mengalami naik turun dikarenakan ditahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia, seiring berjalannya waktu kondisi mulai teratasi dan laju pertumbuhan di Pulau Jawa juga sudah membaik.

Pendapat Kuznet dalam Jinghan (2012:57) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan berkepanjangan dalam kemampuan

sebuah negara dengan upaya menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang semakin banyak kepada masyarakatnya, kemampuan ini sendiri secara otomatis tumbuh selaras dengan perkembangan teknologi serta orientasi (penyesuaian) kelembagaan dan juga aliran (ideologi) yang dibutuhkan. Selain itu pertumbuhan ekonomi digunakan juga sebagai parameter untuk memantau perkembangan dan seberapa majunya suatu wilayah. Faktor internal dan eksternal turut ambil bagian dalam mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sebagai contoh adalah kondisi dimana terdapat peningkatan penghasilan yang dipicu oleh jumlah produksi barang dan jasa yang meningkat. Setelah memahami definisi dari pertumbuhan ekonomi, semua negara tentunya mengharapkan peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Maka dari itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi barang dan jasa di negara-negara tersebut.

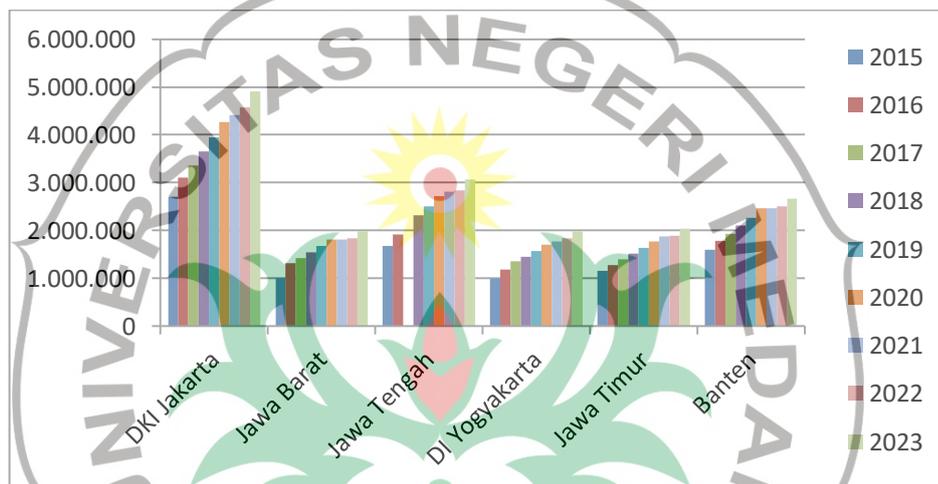
Menurut Kembar Sari (2016) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran terdidik, sedangkan menurut Nila Ayu Islamia (2017) bahwa pertumbuhan ekonomi negatif dan signifikan berpengaruh terhadap pengangguran terdidik.

Berdasarkan perbedaan pendapat keduanya maka hal ini dirasa perlu untuk diteliti lebih lanjut terkait pengaruh pengangguran terdidik yang secara khusus di pulau Jawa.

Pertumbuhan ekonomi sendiri terjadi disebabkan oleh perkembangan perpajakan dalam produksi barang dan jasa yang diakui pada suatu negara. Contohnya adalah kenaikan serta kuantitas produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, kenaikan produksi di bidang jasa, serta kenaikan

produksi barang lokal. Adapun faktor lain yang mempengaruhi pengangguran terdidik adalah upah/ bayaran.

Berikut data Upah Minimum Provinsi (UMP) pada grafik 1.4



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Grafik 1.4

Upah Minimum Provinsi di Provinsi Pulau Jawa (Rupiah)

Dari grafik 1.4 terlihat bahwa terdapat peningkatan upah minimum provinsi yang terdapat di pulau Jawa. Telihat bahwa provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nominal upah minimum tertinggi yaitu sebesar Rp4.901.798 pada tahun 2023 karena pada saat itu terjadinya keadilan bagi para pekerja yang ditegaskan oleh gubernurnya dan terendah ditahun 2015 yaitu Rp2.700.000 ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam pengupahan, dan ditahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan terjadi karna kebutuhan yang layak apabila mengalami kenaikan maka akan berpengaruh terhadap produktivitas upah .

Pada provinsi Jawa Barat tertinggi ditahun 2023 sebesar Rp1.986.670

dikarenakan adanya penetapan upah berdasarkan dewan pengupahan atau para pengusaha, ditahun 2015 merupakan yang terendah yaitu Rp1.000.000 itu karena pertumbuhan ekonomi ditahun ini sangat rendah serta mengalami perlambatan dan ditahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan yang disebabkan oleh peraturan tentang pengupahan yang telah berlaku. Di provinsi Jawa Tengah UMP tertinggi ditahun 2023 sebesar Rp3.060.349 karena kondisi ekonomi dan laju pertumbuhan yang pada saat ditahun ini lebih meningkat dan terendah ditahun 2015 yaitu Rp1.680.500 karna terjadinya kenaikan inflasi pada tahun 2018 sampai 2022 terjadi kenaikan oleh adanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi.

Pada provinsi DI Yogyakarta tertinggi ditahun 2023 sebesar Rp1.981.782 disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan terendah ditahun 2015 yaitu Rp988.500 karena kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan standar hidup yang layak tidak tinggi, ditahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi.

Provinsi Jawa Timur tertinggi ditahun 2023 sebesar Rp2.040.244 karena kondisi spesifik daerah yang memiliki daerah padat industri dan terendah ditahun 2015 yaitu Rp1.150.000 disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam penetapan upah, ditahun 2018 sampai 2022 terjadi kenaikan karena meningkatnya produktivitas daya beli. Pada provinsi Banten tertinggi ditahun 2023 sebanyak Rp2.661.280 karna inflasi yang terjaga dalam penyesuaian daya beli pekerja dan terendah ditahun 2015 yaitu Rp1.600.000 dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan, serta ditahun 2018 dan 2022 mengalami kenaikan yang terjadi pada pertumbuhan di wilayah banten.

Menurut teori Sadono (2005) yang mendeskripsikan karakteristik hubungan antara tingkat peningkatan upah dengan tingginya pengangguran, maka upah memiliki peran yang sangat krusial untuk kelas pekerja, hal ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun keluarga, namun upah memiliki peranan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kelas pekerja. Untuk suatu perusahaan sendiri, besarnya nominal upah yang dikeluarkan akan berpengaruh kepada banyaknya cost (biaya) yang dikeluarkan perusahaan tersebut.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah upah akan mempengaruhi banyaknya biaya produksi, yang berarti peningkatan biaya produksi akan meningkatkan harga suatu produk. Kenaikan harga produk ini nantinya akan mendapatkan respon negatif yang berasal dari konsumen yang menyebabkan pengurangan pembelian produk oleh konsumen. Kondisi ini akan berdampak pada produsen yang mengurangi jumlah produksi dan hal ini akan berpengaruh juga pada pengurangan jumlah buruh atau tenaga kerja yang diserap, dan pengurangan tenaga kerja ini pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengangguran di suatu wilayah. Definisi upah secara umum merupakan imbalan yang diberikan pengusaha atau investor atas partisipasinya dalam proses produksi.

Besar- kecil upah pasti bergantung pada beberapa faktor. Hal ini meliputi tingkat kestabilan politik suatu negara, kondisi internal perusahaan, perekonomian dan juga keamanan secara umum. Adapun faktor lain adalah pemberian upah diorganisir dalam peranturan dan ketentuan yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, begitu pula dengan perusahaan satu dan lainnya.

Menurut Fitri Junaidi (2016) berpendapat bahwa upah tidak berpengaruh signifikan dan negatif dengan pengangguran terdidik sedangkan menurut Kembar Sari (2016) berpendapat bahwasanya upah berpengaruh signifikan yang negatif kepada pengangguran terdidik ini berarti perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dari yang sebelumnya. Inflasi juga merupakan faktor lain yang berperan dalam meningkatnya pengangguran terdidik.

Berikut gambar inflasi di Pulau Jawa pada grafik 1.5



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Grafik 1.5

Tingkat Inflasi Provinsi di Pulau Jawa (Persen)

Dari grafik 1.5 dapat dilihat bahwa nilai Inflasi hampir setiap provinsi yang ada di Pulau Jawa mengalami naik turun. Nilai Inflasi tertinggi di provinsi DKI Jakarta ditahun 2022 sebesar 5,51% disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pangan dan energi global contohnya bahan bakar minyak dan terendah ditahun 2021 yaitu 1,08% karena inflasi global yang rendah sehingga mempengaruhi nilai tukar rupiah, bila dilihat ditahun 2015-2021 mengalami

penurunan dikarenakan perubahan harga komoditas pangan juga stabilitas ekonomi serta ditahun 2023 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada provinsi Jawa Barat Inflasi tertinggi di tahun 2022 sebesar 6,04% disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan dan sewa rumah maka cukup andil membuat inflasi tinggi dan terendah ditahun 2021 yaitu 1,69% karena naiknya komoditas pangan dan energi, apabila dilihat ditahun 2015-2023 inflasinya mengalami naik turun karena terjadinya permintaan domestik yang belum kuat serta pemerintah dan bank yang kurang fokus dalam stabilitas harga.

Provinsi Jawa Tengah tertinggi ditahun 2022 sekitar 4,99% karena meningkatnya permintaan barang dan jasa pada sektor industri dan terendah 2021 ialah 1,49% terjadi karena inflasi global yang rendah sehingga mempengaruhi nilai tukar rupiah, jika dilihat dari tahun 2015 sampai 2023 inflasi mengalami naik turun yang tidak stabil karena perubahan dalam kenaikan nilai tukar mata uang dan ketika permintaan barang meningkat tetapi penawaran menurun maka akan membuat inflasi naik. Pada provinsi DI Yogyakarta tertinggi ditahun 2022 yaitu 6,49% disebabkan oleh meningkatnya harga pangan contohnya beras serta minyak dan terendah ditahun 2020 ialah 1,40% karena permintaan domestik yang belum kuat akibat dari pandemi covid-19, pada tahun 2015 inflasi tinggi tetapi jika dilihat sampai 2023 mengalami fluktuasi yang terjadi akibat ketidakstabilan harga komoditas

Provinsi Jawa Timur tingkat inflasi tertinggi ditahun 2022 sebanyak 4,24% akibat naiknya harga pangan dan permintaan barang jasa, terendah ditahun 2020 yaitu 1,44% karena inflasi global rendah jika dilihat 2015 sampai 2023

mengalami penurunan dan kenaikan karena tidak stabilnya permintaan domestik maka akibatnya lemahnya ekonomi global. Provinsi terakhir yaitu Banten dimana inflasi tertinggi nya pada tahun 2022 sebesar 5,08% terjadi karena naiknya harga pangan, barang dan jasa, terendah yaitu 2020 yaitu 1,45% terjadi akibat permintaan domestik yang rendah karena pandemi covid-19, dan ditahun 2015 sampai tahun 2023 inflasi naik turun terjadi akibat rendahnya semua inflasi global dan tingginya suku bunga.

Sejalan dengan teori A.W. Philips (1958) yang mengatakan bahwa dengan Sejalan dengan teori A.W. Philips yang mengatakan bahwa dikarenakan adanya Inflasi (Kenaikan harga) maka para produsen akan meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (Cara ini merupakan input satu-satunya yang dapat meningkatkan output) hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan tersebut.

Terjadinya inflasi disebabkan oleh biaya produksi seperti naiknya bahan baku serta kebijakan moneter seperti jika terjadinya suku bunga rendah maka memicu dalam peminjaman.

Menurut Musfira Nur (2016) menyatakan bahwa jika dilihat secara langsung maupun tidak langsung, tidak ada pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terdidik. Sedangkan menurut Mukti Hadi Prasaja (2013) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terdidik ini berarti perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dari yang sebelumnya.

1.1 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, ditemukan masalah sebagai berikut:

1. Jumlah pengangguran terdidik di setiap provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi dan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pengangguran terdidik diukur dari rasio presentase melalui data jumlah tamatan terdidik yang ada di Pulau Jawa.
2. Jumlah Pertumbuhan Ekonomi yang selalu mengalami peningkatan tetapi tidak diikuti dengan jumlah pengangguran terdidik yang berkurang.
3. Upah minimum yang cenderung meningkat setiap tahunnya di setiap provinsi belum mampu menyerap tenaga kerja dalam mengurangi jumlah pengangguran terdidik.
4. Inflasi di setiap provinsi di Pulau Jawa sebagian belum dapat mengurangi jumlah pengangguran terdidik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Terdidik di Pulau Jawa?
2. Apakah ada pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Pengangguran Terdidik di Pulau Jawa?
3. Apakah ada pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran Terdidik di Pulau Jawa?
4. Apakah ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi,

dan Inflasi secara simultan terhadap Pengangguran Terdidik di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diuraikan di bawah ini, dengan mempertimbangkan rumusan masalah yang telah ditulis:

1. Untuk menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terdidik di Pulau Jawa.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum tiap provinsi di Pulau Jawa terhadap pengangguran terdidik.
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pengangguran terdidik di setiap provinsi di Pulau Jawa dipengaruhi oleh inflasi.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengangguran terdidik di Pulau Jawa dipengaruhi secara bersamaan oleh inflasi, upah minimum provinsi, dan pertumbuhan ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Pemerintah

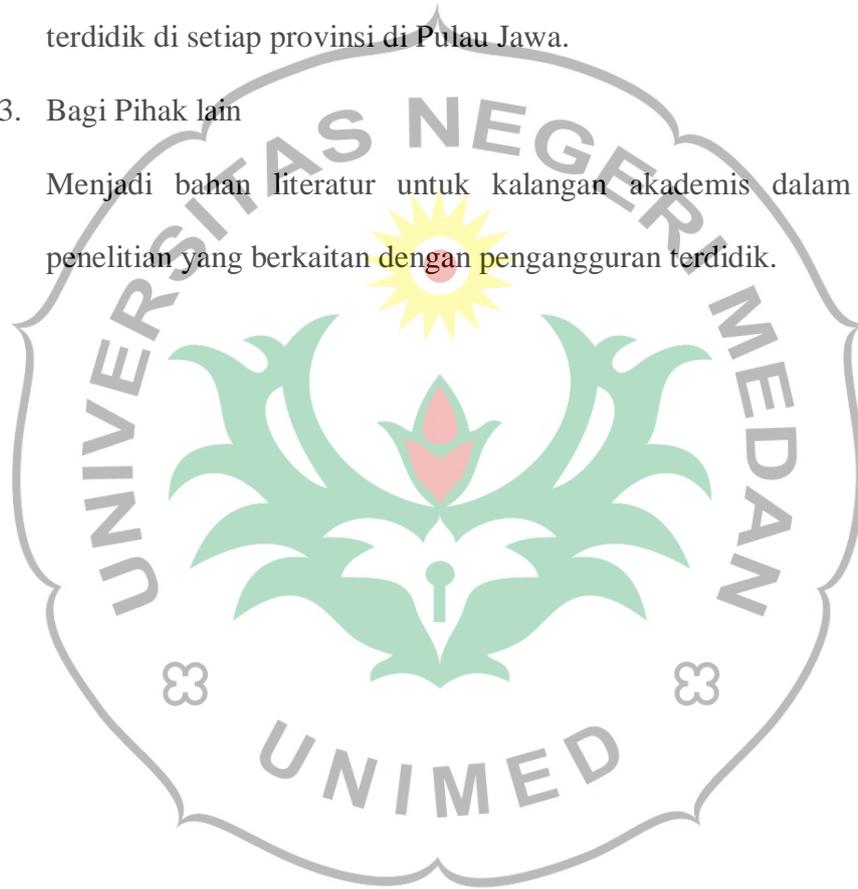
Berkontribusi untuk pemerintah, secara khusus pemerintah provinsi yang terdapat di pulau Jawa dalam menetapkan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan. Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan ilustrasi kepada pihak pemerintah dan pihak lain yang terikat dalam menyusun dan menerapkan kebijakan, khususnya pada permasalahan pengangguran terdidik.

2. Bagi Peneliti

Dapat memperoleh pemahaman yang lebih mengenai pengangguran terdidik di setiap provinsi di Pulau Jawa.

3. Bagi Pihak lain

Menjadi bahan literatur untuk kalangan akademis dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengangguran terdidik.



THE
Character Building
UNIVERSITY